

**KINERJA PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA
MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA PANTAI
MAKMUR KABUPATEN BEKASI**

Erma Dwiningsih, Megayanti Afrilia, Ummi Zakiyah
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: zakiyahmyamin@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tulisan ini ingin melihat bagaimana kinerja pemerintah desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa Pantai Makmur kecamatan Tarumajaya kabupaten Bekasi. Diberlakukannya sistem desentralisasi setelah runtuhnya orde baru, pemerintah daerah telah mengalami banyak peningkatan untuk dapat mengelola dan mengurus urusan daerahnya masing-masing. Dalam hal ini, salah satunya adalah pemerintahan dibawah pemerintah kabupaten/kota, yaitu pemerintah desa. Saat ini Pemerintah Desa telah sangat maju, demokratis, dan mandiri dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi setiap masyarakatnya. Jika sebelum adanya desentralisasi, masyarakat daerah-daerah sangat susah untuk memenuhi segala kebutuhan, seperti barang atau administrasi bahkan sampai memakan keuangan yang tinggi, maka dengan berlakunya sistem desentralisasi masyarakat di daerah (desa) bisa memenuhi segala kebutuhan mereka secara efektif dan efisien. Oleh karena itu kasus ini menjadi menarik untuk diteliti agar terlihat bagaimana kinerjapemerintah desa dalam meningkatkan masyarakatnya setelah adanya desentralisasi.

Kata Kunci : desentralisasi, pemerintah desa, kinerja

PENDAHULUAN

Diberlakukannya sistem desentralisasi setelah runtuhnya orde baru, Pemerintah Daerah telah mengalami banyak peningkatan untuk dapat mengelola dan mengurus urusan daerahnya masing-masing. Dalam hal ini, salah satunya adalah Pemerintahan dibawah Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu Pemerintah Desa. Saat ini Pemerintah Desa telah sangat maju, demokratis, dan mandiri dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi setiap masyarakatnya. Jika sebelum adanya desentralisasi, masyarakat daerah-daerah sangat susah untuk memenuhi segala kebutuhan, seperti barang atau administrasi bahkan sampai memakan keuangan yang tinggi, maka dengan berlakunya sistem desentralisasi masyarakat di daerah (desa) bisa memenuhi segala kebutuhan mereka secara efektif dan efisien.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia (berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)¹. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata desa berarti sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung atau dusun. Kata desa ini bisa menjadi negatif ketika seseorang mengartikan desa sebagai udik atau dusun yang sebenarnya mengartikan pada sebuah tempat dan bukan sifat. Di berbagai daerah di Indonesia, desa bisa disebutkan dengan beberapa istilah, misalnya di Aceh masyarakat menyebut Desa dengan Gampong dan Meunasah, di Sumatera Selatan disebut Huta dan Huria, Kalimantan disebut Borneo, Sulawesi disebut Kampung, dan di Maluku disebut Negeri, banyaknya istilah ini menunjukkan keunikan dari setiap Desa yang ada di Indonesia.

Sama halnya dengan Negara, Provinsi, atau pun Kabupaten/Kota yang memiliki lembaga penyelenggara pemerintahannya masing-masing, Desa juga memiliki Pemerintahan Desa yang bertugas dan berwenang untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah disebutkan bahwa Pemerintah Desa yang kemudian pemegang kekuasaan di

¹ UU Nomor 6 Tahun 2014

sebut Kepala Desa dibantu dengan perangkat desa lainnya saling bekerja sama untuk memenuhi segala kebutuhan serta mensejahterakan masyarakat desa. Berbagai rencana penyusunan program kegiatan atau program kinerja telah disusun sedemikian rapi dan terencana agar bukan hanya dapat membangun desa tapi juga membangun masyarakat desa.

Masyarakat desa pada umumnya bekerja dan mendapatkan penghasilan dari hasil alam yang tersedia, seperti pertanian, peternakan, nelayan. Namun penghasilan tersebut belum 100% bisa memenuhi kebutuhan ekonomi setiap masyarakat desa. Maka dari itu, banyak masyarakat desa (terutama masyarakat yang berusia sekitar 20-30 tahun an) yang merantau ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan yang layak agar dapat membantu perekonomian keluarga mereka di Desa.

Perlu diketahui Desa tidak hanya berada di daerah-daerah yang letaknya jauh dari kota-kota besar, namun juga terdapat Desa yang terletak tidak jauh dari Ibukota DKI Jakarta, salah satunya Desa Pantai Makmur yang terletak di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Walaupun letaknya yang tidak jauh dari DKI Jakarta, tidak membuat kehidupan masyarakat Desa Pantai Makmur menjadi sejahtera seutuhnya. Desa Pantai Makmur terbilang hampir terbelakang dari Kabupaten Bekasi sehingga sulit untuk dilirik Pemerintah Kabupaten. Hampir semua masyarakat kesulitan bila ingin mengurus surat-surat karena jarak yang amat jauh dari Desa ke Kabupaten, sehingga membutuhkan waktu yang terbilang cukup lama bagi Pemerintah Desa untuk mengurusnya dan yang lebih sangat disayangkan banyak warga Desa Pantai Makmur yang lebih memilih untuk mengurusinya di DKI Jakarta.

Namun sekarang, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa telah diberikan kewenangan dan hak untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia agar masyarakat Desa tidak perlu bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama administrasi. Dan dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan masyarakat Desa akan lebih sejahtera lagi.

KINERJA PEMERINTAH DESA PANTAI MAKMUR

A. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengajarkan dan mendidik anak-anak baik dari usia dini sampai berumur 17 tahun agar mereka memiliki masa depan yang baik agar dapat membangun angsa kedepannya. Dengan adanya kebijakan wajib belajar 12 tahun dari Pemerintah, Desa Pantai Makmur makin meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak Desa. Hampir semua anak-anak di Desa Pantai Makmur bersekolah. Dari data yang didapat, Desa Pantai Makmur telah memiliki total 9 sekolah yang berada di Desa tersebut. Sekolah tersebut terdiri atas 3 Sekolah Dasar Negeri, 2 Madrasah Ibtidaiyah, 1 Sekolah Menengah Atas Negeri, 2 Madrasah Tsanawiyah, serta 1 Sekolah Menengah Kejuruan.

Tidak sampai disitu saja, walaupun bukan pada masa Pemerintahan Desa Pantai Makmur yang sekarang namun Pemerintah Desa yang menjabat sebelumnya telah membangun Pendidikan bagi anak-anak Desa yang belum cukup umur untuk masuk ke SD, yaitu Pendidikan Anak Sekolah Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK). Maka dari itu, Pemerintah Desa Pantai Makmur yang menjabat sekarang akan melanjutkan apa yang telah dilakukan Pemerintah Desa sebelumnya dengan terus memantau pendidikan anak-anak Desa serta memantau segala infrastruktur yang berhubungan dengan pendidikan di Desa Pantai Makmur.

Walaupun sampai saat ini belum ditemukan masalah yang serius bagi bidang pendidikan di Desa Pantai Makmur, mereka akan terus berusaha untuk memajukan pendidikan di Desa tersebut dan apabila seiring berjalannya waktu terjadi masalah akan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Pantai Makmur.

B. Bidang Kesehatan

Pemerintah Desa Pantai Makmur benar-benar memperhatikan kesehatan masyarakat, terbukti dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Pemerintahan, Bapak A. Zainudin mengatakan hingga saat ini di Desa Pantai Makmur belum ditemukannya masyarakat yang terkena wabah penyakit, seperti demam berdarah, TBC, atau beberapa penyakit lainnya. Walaupun begitu, Pemerintah Desa

Pantai Makmur terus memantau dan serta siap siaga jika misalnya ada masyarakat Desa Pantai Makmur yang terkena wabah penyakit.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bapak Zainudin, bahwa untuk mencegah tersebarnya wabah penyakit Pemerintah Desa bekerja sama dengan anggota KPK dan instansi kesehatan setempat (bidan, perawat, maupun dokter) untuk mengadakan agenda rutin 1 bulan sekali, yaitu Posyandu. Posyandu sendiri diadakan untuk pemberian vaksin dan pemeriksaan bagi batita, balita, maupun ibu hamil, karena mereka sangat mudah terkena virus wabah penyakit. Program Posyandu di fasilitasi dengan anggaran yang berasal pihak Pemerintah Desa Pantai Makmur, baik itu tempat atau gedung sampai alat-alat yang digunakan untuk keperluan posyandu, seperti timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan batita dan balita, sedangkan untuk obat-obatan dan vaksin berasal dari instansi kesehatan setempat.

Disamping itu, untuk meningkatkan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya, di Desa Pantai Makmur telah berdiri beberapa instansi kesehatan seperti 2 Klinik, 1 Puskesmas, dan 1 Rumah Sakit. Untuk itu, masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan pengobatan dari instansi kesehatan.

C. Bidang Kesejahteraan dan Sosial

Sudah bukan rahasia lagi kalau kesejahteraan dan sosial masyarakat Desa sangat kurang untuk dapat terpenuhi, baik dari segi infrastruktur yang kurang memadai sampai pada pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa setempat. Biasanya hal-hal tersebut terjadi pada Desa-Desa yang terletak di daerah pedalaman Indonesia, namun nyatanya Desa yang dekat dengan Kota besar pun mengalami hal serupa seperti Desa Pantai Makmur. Hidup dekat dengan DKI Jakarta tidak membuat kesejahteraan dan sosial masyarakat Desa Pantai Makmur berjalan dengan baik, nyatanya masih ada beberapa masalah yang terjadi di Desa Pantai Makmur baik dalam hal infrastruktur maupun pelayanan publik yang diterima masyarakat.

- a) Dalam hal infrastruktur di Desa Pantai Makmur yang sering dipermasalahkan oleh masyarakat adalah jalan. Jalan yang dimaksud bukanlah jalan raya karena segala infrastruktur jalan raya dibawah naungan Pemerintah Provinsi. Jalan yang dimaksud masyarakat Desa mengalami

masalah adalah jalan-jalan yang berada di gang-gang Desa Pantai Makmur. Pada saat ini, masyarakat Desa sangat mengeluhkan jalan gang yang sangat memprihatinkan. Narasumber mengatakan bahwa jikalau hujan, jalan disekitar tempat tinggal mereka (jalan gang) akan sangat berlumpur atau becek, sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat Desa. Untuk itu Pemerintah Desa yang sekarang menjabat berupaya untuk memperbaiki jalan tersebut. Dengan menggunakan sisa anggaran Pemerintah sebelumnya, Pemerintah Desa Pantai Makmur mulai memperbaiki jalan. Karena anggaran yang kurang perbaikan sampai saat bulan Mei lalu baru berjalan sekitar 30%, sebab anggaran yang kurang disamping juga anggaran tersebut juga digunakan untuk gaji pegawai serta untuk kegiatan Pemerintah Desa lainnya.

- b) Sama halnya dengan Kantor Desa lainnya di Indonesia, Kantor Desa Pantai Makmur juga melayani pelayanan administrasi masyarakat, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta berbagai surat-surat lainnya. Di Kantor Desa Pantai Makmur sendiri telah dilengkapi dengan komputer bagi setiap pegawai guna mempercepat dalam hal menginput data administrasi masyarakat Desa. Namun walaupun begitu pihak Kantor Desa Pantai Makmur belum bisa menentukan waktu penyelesaian pengurusan surat hal tersebut juga yang masih sering dikeluhkan oleh masyarakat. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa Pantai Makmur agar terus meningkatkan kinerja mereka lagi. Di Kantor Desa Pantai Makmur belum menerapkan sistem *electronic government (e-gov)*. Ini terbukti bahwa Kantor Desa Pantai Makmur belum memiliki alamat website secara resmi. Padahal bila Kantor Desa Pantai Makmur memiliki alamat website resmi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi di dalamnya. Namun saat ditanyakan lebih lanjut, narasumber mengatakan sudah memiliki keinginan untuk menerapkan sistem *e-gov* di Kantor Desa Pantai Makmur.
- c) Selanjutnya, semenjak bulan Januari lalu apabila ada masyarakat Desa yang meninggal, Pemerintah Desa baru bisa menyumbang sebesar Rp 1.000.000,

yang dikarenakan belum adanya anggaran atau dana yang belum turun, jadi memakai anggaran saat ini tersedia.

- d) Biasanya setiap Desa memiliki agenda khusus dari Pemerintah Desa, karena yang kita ketahui bahwa masyarakat desa sangat dekat satu sama lain walaupun tidak ada hubungan darah. Maka dalam hal ini Pemerintah Desa Pantai Makmur memberlakukan agenda rutin, yaitu senam pagi dan gotong royong setiap minggunya. Kegiatan ini bukan hanya bisa mempererat hubungan sosial antara masyarakat dengan masyarakat tapi juga hubungan sosial masyarakat dengan Pemerintah Desa. Selain itu dengan adanya agenda kegiatan ini, Pemerintah Desa juga bisa mendengar secara langsung apa saja yang dikeluhkan oleh masyarakat desa agar cepat segera diatasi.
- e) Selain agenda diatas, Pemerintah Desa Pantai Makmur juga memiliki agenda lainnya seperti salah satunya “Musyawarah Desa (Musdes)” setiap 1 bulan sekali dan rapat rutin tiap minggunya (setiap hari kamis, pagi) antara Pemerintah Desa, Kadus, RT, RW untuk membahas segala perencanaan program kinerja yang akan dilakukan selanjutnya. Dari hasil laporan yang didapat, hasil rapat yang telah dilakukan di Kantor Desa Pantai Makmur menghasilkan sebuah rencana kinerja selanjutnya apabila anggaran telah tersedia (dana turun) di Desa Pantai Makmur, yakni:
- 1) Melanjutkan pembangunan atau perbaikan infrastruktur jalan yang saat ini terhenti pengerjaannya,
 - 2) Pembangunan saluran air,
 - 3) Penghijauan (penanaman pepohonan atau tumbuhan hijau disekitar jalan).

Namun yang disayangkan dari Desa Pantai Makmur adalah Desa ini belum memiliki sumber daya asli, yaitu pariwisata. Kita tau sendiri bahwa pariwisata merupakan tempat atau destinasi bagi masyarakat yang sedang dalam suasana liburan. Selain sebagai tempat destinasi liburan, pariwisata bisa saja menambah penghasilan bagi Desa (PAD) sehingga keuangan Desa tidak hanya berpusat dari anggaran APBD.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Pantai Makmur yang baru berjalan kurang lebih 7 bulan ini sudah berupaya untuk menjalankan kinerjanya dengan memperbaiki infrastruktur jalan yang berada di gang karena hal tersebut banyak dikeluhkan oleh masyarakat Desa Pantai Makmur. Selain itu bagi bidang pendidikan dan kesehatan belum dijumpai adanya masalah yang terlalu besar hingga memerlukan penanganan, hal itu mengapa Pemerintah Desa masih melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Pantai Makmur sebelumnya. Untuk meningkatkan hubungan sosial di Desa Pantai Makmur, agenda rutin yang selalu dilakukan adalah Musdes, rapat rutin, gotong royong, dan senam pagi. Hal tersebut dilakukan agar hubungan sosial dan komunikasi antar sesama masyarakat maupun masyarakat-Pemerintah Desa bisa berjalan baik dan mereka bisa saling terbuka untuk membangun Desa Pantai Makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Ma'ruf. 2014. "*Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*". Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Hal: 2-3.
- Hurcholis, Hanif. 2007. "*Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*". Cetakan Kedua. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pitono, Andi & Kartiwi. 2016. "*PENGUATAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT*". Jurnal Politikologi. Vol 3 No 1. Hal:29-30.
- Simandjuntak, Reynold. 2015. "*Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*". de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum. Vol 7 No 1. Hal: 60.

Yullyanti, Ellyta. 2009. "*Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi pada Kinerja Pegawai*".
Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Vol 16 No 3. Hal:
133.

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah